

I. SURAT PENOLAKAN PERUBAHAN DATA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(2)

JALAN TELEPON FAKSIMILI SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PENOLAKAN PERUBAHAN DATA
Nomor:..... (3)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, dengan ini dinyatakan bahwa permohonan perubahan data:
1. NPWP/NIK : (4)
2. Nama : (5)
ditolak dengan alasan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan perubahan data.

....., (6)

QR Code Segel

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERUBAHAN DATA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah yang menjadi unit vertikal dari Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor surat penolakan perubahan data.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat penolakan perubahan data.